

Fungsi Kebijakan Pendidikan

Anisa Lestari^{1*}, Wiene Surya Putra², Aisyah Alda³

Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Indonesia

Email: Anisalestari@Gmail.Com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol:1,Nomor:2,Desember 2023 Halaman : 688-693	<i>This article will explain the function of education policy in Indonesia. The approach used in this presentation is descriptive by referring to current laws, writings by educational experts and appropriate theories. Policy is obtained through a policy-making process. Policy making is seen as a number of processes from all parts and is related to the social system in creating system targets. The decision-making process takes into account external environmental factors, input, transformation processes, output and feedback from the environment to policy makers. Based on the assertion above, it can be concluded that policies are created to serve as guidelines for action, directing activities within the organization to achieve predetermined goals.</i>
Keywords: education policy function	

Abstrak

Tulisan ini akan memaparkan tentang fungsi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini, tulisan-tulisan para pakar pendidikan dan teori-teori yang sesuai. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses transformasi, output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Fungsi Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan (*policy*) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesempatan, konvensi, dan rancangan strategis. Definisi kebijakan pendidikan salah satu kebijakan Negara memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama Antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dengan dasar kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama Indonesia menjadi beban bersama orangtua, masyarakat, Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat dan menghafal (*rote learning*), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yang terkenal

dengan empat pilar belajar, yakni *“learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be.”* Sistem Pendidikan Nasional adalah “sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.”

Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan publik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik, misalnya para pihak pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya.

METODE

Paparan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada tulisan-tulisan para ahli pendidikan, mencoba memetakan kebijakan – kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dan berupaya untuk memberikan arah baru serta perubahan kebijakan yang terjadi sesuai perkembangan yang ada. Tujuan tulisan ini diharapkan menjadi sebuah pendapat awal bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan kebijakan di Indonesia. Subyek yang menjadi sorotan adalah kebijakan pendidikan yang selama ini berjalan dengan memperhatikan kondisi aktual yang dinamis, hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli pendidikan, baik dengan membaca buku dan jurnal yang terkait dengan tulisan ini. Buku dan Jurnal tersebut menjadi acuan untuk memaparkan kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa selanjutnya diambil sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kebijakan pendidikan

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017).

Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017).

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses menjelaskan visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Komponen Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu; 1) Goal (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak; 2) Plans (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas; 3) Programme (Program). Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan; 4) Decision (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak; 5) Effects (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Komponen-komponen ini lah yang dapat menimbulkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah di desain, (Akib, 2012).

Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya, (Sulistiyadi, 2014).

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan, (Prasojo, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam proses implementasi kebijakan akan terlihat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dari semua rangkaian perumusan kebijakan pendidikan, maka proses implementasi ini lah yang menjadi tahapan yang lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah.

Proses implementasi kebijakan pendidikan terdiri umumnya menggunakan empat pendekatan yaitu: 1) Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya, (Yuliah, 2020). Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cenderung kaku;

2) Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan dibandingkan penataan struktur pelaksana, (Setyawan, 2014). Sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan;

3) Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah perilaku manusia, (Machali, 2015). Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik;

4) Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperlambat penerapan kebijakan pendidikan, (Hartono, 2016). Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi.

Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakannya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Fungsi Kebijakan Pendidikan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturanaturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan *kebijakan (policy making)* adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7).

Menurut Nanang Fattah, fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah:

1. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintahan perlu ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan berbeda-beda.
2. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Perlu diupayakan pendirian suatu lembaga independen dan mandiri yang bertugas khusus untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan.
3. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan disini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:

Memiliki tujuan pendidikan

Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan, (Lazwardi, 2017).

Terpenuhinya aspek legal dan formal

Sebelum kebijakan pendidikan di belakukan maka perlu dipenuhi prasyarat-prasyarat yang agar kebijakan tersebut berlaku sah dan diakui. Oleh sebab itu perlunya kebijakan tersebut di sah kan melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan, (Anwar, 2017).

Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat panduan yang bersofat umum. Maka sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan, (Solichin, 2015). Konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat di ukur secara jelas.

Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dibuat oleh par ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam pembuatan kebijakan, (Heriawan, 2018). Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan,(Lukitasari et al, 2017). Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan maka harus dapat diperbaiki

Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan deskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh bersofat rapuh struktur, (Rahman, 2014). Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun Eksternal.

KESIMPULAN

Definisi kebijakan pendidikan salah satu kebijakan Negara memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoprasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama Antara orang tua,masyarakat, dan pemerintah. Dengan dasar kata- kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama Indonesia menjadi beban bersama orangtua, masyarakat, undang- Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan yangdapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan.

REFERENCES

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pedidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05),1-10.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.

- Fatkuroji, F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 28-40.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35-45.
- Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi(SLTA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur. *Pandas Mahakam : Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 98-116.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal kependidikan Islam*, 7(1), 119-125.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121-134.
- Machali, I. (2015). Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. *EL TARBAWI*, 8(1), 32-53.
- Prasojo, L. D. (2010). Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4(02), 1-10.
- Rahman, H. (2014). Miskonsepsi Pendidikan Gratis. *Jurnal Al- Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 6(1), 36-45.
- Riant, N. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.
- Setiyawan, E. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 122-128.
- Sholichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178
- Suyahman, S.(2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112408.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1-10.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16-40.